

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada April 2024 mendorong BPKH agar mengalami peningkatan realisasi penyaluran program kemaslahatan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan dampaknya, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel (Ameliya, 2024). Dorongan ini mencerminkan harapan tinggi publik terhadap program kemaslahatan BPKH, serta pertumbuhan berkelanjutan dalam skala pendanaan dari tahun ke tahun.

Sejak diresmikan pada tahun 2018, program kemaslahatan BPKH telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan cakupan luas di seluruh pelosok negeri. Program ini menjangkau tujuh bidang prioritas yaitu pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, serta tanggap bencana, yang disalurkan melalui jaringan mitra kemaslahatan yang terus berkembang. Kemaslahatan bersifat sosial, melibatkan berbagai bidang yang berbeda dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. BPKH sebagai lembaga pengelola publik berskala besar harus bisa memastikan setiap anggaran yang dialokasikan kepada masyarakat dapat tersalur dengan baik dan tepat sasaran (BPKH, 2021).

Seiring meningkatnya skala program, analisis kebutuhan umat dan kesiapan kapasitas kelembagaan BPKH menjadi aspek yang semakin kompleks, mengingat program kemaslahatan bersifat sosial, melibatkan berbagai bidang yang berbeda dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Kajian mendalam tentang bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan umat, menyiapkan kapasitas kelembagaan, serta menjalankan mekanisme monitoring dan evaluasi program menjadi penting untuk dipahami agar program yang dijalankan dapat semakin efektif dan tepat sasaran (BPKH, 2024). Sejak BPKH berdiri telah meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh kali berturut-turut, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Capaian ini sekaligus menjadi landasan untuk BPKH memperkuat implementasi *good governance* serta menerima evaluasi eksternal, agar dapat menjamin setiap dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal untuk umat (BPKH, 2026). Seiring dengan pertumbuhan skala program yang semakin besar, kajian mendalam tentang bagaimana Nilai Manfaat DAU dialokasikan secara tepat berdasarkan prioritas kebutuhan umat dan menghasilkan dampak sosial yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Perkembangan ini selaras dengan UU No. 14 Tahun 2025 yang membawa pembaruan mendasar dalam pengelolaan keuangan haji yang lebih akuntabel dan transparan, di mana penggunaan Nilai Manfaat DAU untuk program kemaslahatan memerlukan persetujuan DPR. BPKH sendiri menegaskan bahwa perannya tidak sekedar mengelola investasi, melainkan juga mencakup tanggung jawab penuh

terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat Islam (BPKH, 2026).

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, banyak membahas terkait pengelolaan DAU oleh BPKH. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan dana, serta pentingnya akuntabilitas dan berkelanjutan program kemaslahatan (Fitriyani et al., 2023; (Hendarsa et al., 2022)Hidayati et al., 2024; Nurchoiriyah, et al., 2025). Namun kajian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana proses analisis kebutuhan umat dilakukan, bagaimana mekanisme implementasi dan monitoring program dijalankan, serta bagaimana dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan dinilai masih sangat terbatas. Ruang inilah yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih mendalam, agar pemahaman tentang manajemen evaluasi program kemaslahatan BPKH dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas program bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai fakta, tantangan, dan temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Nilai Manfaat DAU di Indonesia yang dipercayakan kepada BPKH menjadi salah satu langkah strategis yang penting dalam mendukung kesejahteraan umat islam secara berkelanjutan. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH tidak hanya bertanggung jawab mengelola dana untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga mengoptimalkan nilai manfaat dari DAU yang diperuntukkan pada berbagai program kemaslahatan. Program-program tersebut meliputi pelayanan ibadah haji,

pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta tanggap bencana, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kontribusi ini menjadi salah satu bentuk realisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis prinsip syariah, yang berupaya menjawab kebutuhan kesejahteraan umat dan memperkuat fondasi sosial keagamaan di Indonesia (BPKH, 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan umat, menyiapkan kapasitas kelembagaan, mengimplementasikan, memonitor, serta memastikan dampak dan berkelanjutan program kemaslahatan bagi kesejahteraan umat. Kajian ini dilakukan melalui studi kasus untuk mengidentifikasi bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program dirancang secara sistematis, melalui analisis wawancara dan observasi lapangan yang menunjukkan apakah strategi, sumber daya, dan mekanisme *monitoring* yang tersedia sudah memadai untuk memastikan ketepatan penyaluran dana kepada sasaran yang tepat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Dengan hasil penelitian ini diharapkan muncul rekomendasi strategis yang dapat memperkuat tata kelola pengelolaan DAU, sekaligus penelitian ini menjadi tinjauan bagi BPKH untuk meningkatkan kualitas dan dampak program kemaslahatan demi kesejahteraan umat Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian literatur di bidang Manajemen Haji dan Umrah, khususnya terkait tata kelola keuangan haji serta pemanfaatan nilai manfaat DAU untuk kemaslahatan umat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan umat dan menyiapkan kapasitas kelembagaan serta strategi dalam merancang program kemaslahatan yang efektif?
2. Bagaimana BPKH mengimplementasikan dan memonitor program kemaslahatan untuk memastikan ketepatan penyaluran dana kepada sasaran yang tepat?
3. Bagaimana dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan BPKH terhadap kesejahteraan umat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi BPKH dalam menganalisis kebutuhan umat dan menyiapkan kapasitas kelembagaan serta strategi dalam merancang program kemaslahatan yang efektif.
2. Untuk menganalisis BPKH dalam mengimplementasikan dan memonitor program kemaslahatan untuk memastikan ketepatan penyaluran dana kepada sasaran yang tepat.
3. Untuk menganalisis dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan BPKH terhadap kesejahteraan umat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur di bidang Manajemen Haji dan Umrah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan haji dan pemanfaatan nilai manfaat DAU. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan gambaran tentang bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan

umat, mengimplementasikan dan memonitor program kemaslahatan, serta memastikan dampak dan keberlanjutannya bagi kesejahteraan umat, yang bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan tentang pengelolaan dana haji melalui integrasi model evaluasi CIPP dengan teori *good governance*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi BPKH untuk meningkatkan pengelolaan dan pengalokasian nilai manfaat DAU dalam program kemaslahatan, termasuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholder*. Serta untuk program studi manajemen haji dan umrah di berbagai perguruan tinggi, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah, sehingga mahasiswa mendapat gambaran nyata tentang bagaimana dana haji dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

E. Landasan Teori

1. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) adalah kerangka kerja evaluasi multidimensi yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam pada akhir tahun 1966. Model ini menekankan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk meningkatkan (*to improve*), bukan sekedar membuktikan (*to prove*). Model CIPP terdiri dari empat komponen evaluasi: *Context* (menilai kebutuhan dan tujuan), *Input* (menilai strategi dan rencana kerja), *Process* (memantau pelaksanaan), dan *Product* (menilai hasil dan dampak program) (Stufflebeam, 2003).

Model CIPP relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka sistematis untuk menganalisis program kemaslahatan BPKH secara menyeluruh sesuai dengan ketiga fokus penelitian. Evaluasi konteks digunakan untuk menilai bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan riil umat dan merancang program yang efektif, evaluasi input untuk mengkaji kesiapan kapasitas kelembagaan dan strategi perancangan program, evaluasi proses untuk mengkaji mekanisme implementasi dan sistem monitoring, serta evaluasi produk untuk menilai dampak dan keberlanjutan program terhadap kesejahteraan umat. Integrasi model CIPP dengan teori *good governance* memungkinkan penelitian untuk menilai tidak hanya aspek teknis manajemen program, tetapi juga kualitas tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi.

2. Good Governance

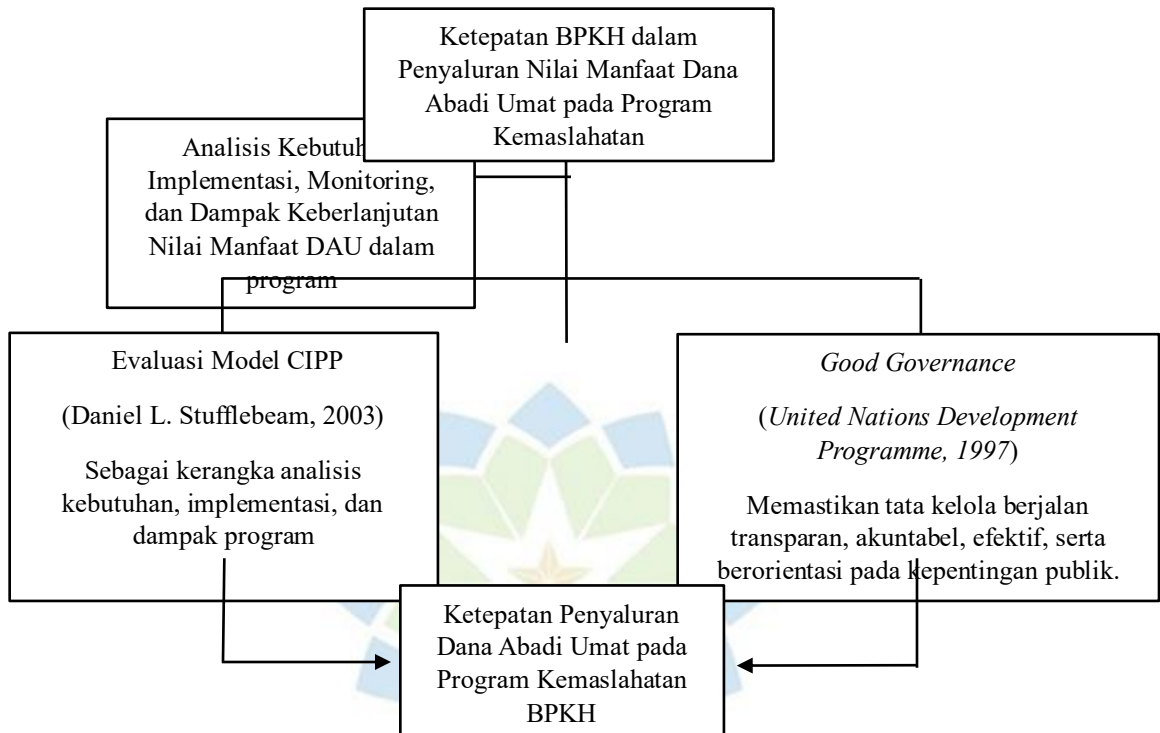
Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Duarmas et al., 1999). *Good governance* menurut United Nations Development Programme adalah hubungan sinergis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, di mana sumber daya dan masalah publik dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Nurhidayat, 2023). UNDP merumuskan sembilan karakteristik atau prinsip esensial dalam penyelenggaraan *good governance*, yaitu: partisipasi (*Participation*), kepastian Hukum (*Rule of Law*), transparansi (*Transparency*), daya tanggap (*Responsiveness*), berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*),

kesetaraan (*Equity*), efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), akuntabilitas (*Accountability*), visi Strategis (*Strategic Vision*) (Elahi, 1997).

Teori *Good Governance* dari UNDP relevan dengan penelitian ini karena BPKH sebagai pengelola dana publik harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip akuntabilitas memastikan BPKH bertanggung jawab kepada umat dan publik sebagai *stakeholder*. Prinsip transparansi dan partisipasi menjadi kerangka untuk menilai keterbukaan informasi alokasi dana dan keterlibatan *stakeholder* dalam program. Prinsip efektivitas dan efisiensi menjadi standar mengukur ketepatan penyaluran dan dampak program terhadap kesejahteraan umat. Prinsip kepastian hukum memastikan pengelolaan sesuai UU No. 34 Tahun 2014. Teori ini juga mengintegrasikan peran pemerintah (BPKH), sektor swasta (mitra program), dan masyarakat (penerima manfaat) untuk mewujudkan program kemaslahatan yang berkelanjutan (Rahmawati & Tjenreng, 2025).



F. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara manajemen program kemaslahatan BPKH yang mencakup analisis kebutuhan umat, implementasi dan monitoring, serta dampak dan keberlanjutan program dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam sebagai kerangka utama untuk menganalisis ketiga fokus penelitian tentang program kemaslahatan, yang kemudian diintegrasikan dengan prinsip-prinsip *good governance* dari *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk menilai kualitas tata kelola pengelolaan DAU.

Model evaluasi CIPP digunakan untuk mengkaji empat aspek utama dalam pengelolaan program kemaslahatan BPKH. Pertama, evaluasi konteks (*Context*) menganalisis kesesuaian program dengan kebutuhan riil umat dan relevansi tujuan program dengan kondisi sosial masyarakat. Kedua, evaluasi input (*Input*) mengkaji perencanaan program, kualitas sumber daya, dan kesiapan sistem untuk melaksanakan program. Ketiga, evaluasi proses (*Process*) memantau mekanisme implementasi program, sistem penyaluran dana, monitoring pelaksanaan, dan identifikasi hambatan atau penyimpangan. Keempat, evaluasi produk (*Product*) menilai hasil dan dampak program terhadap kesejahteraan umat serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.

Prinsip-prinsip *good governance* dari UNDP yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, kesetaraan, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, dan visi strategis diintegrasikan dalam setiap tahap evaluasi CIPP. Akuntabilitas memastikan BPKH bertanggung jawab kepada *stakeholder* dalam setiap keputusan alokasi dana. Transparansi menjamin keterbukaan informasi tentang mekanisme, dan hasil program. Partisipasi melibatkan *stakeholder* dalam proses perencanaan dan evaluasi. Efektivitas dan efisiensi mengukur pencapaian tujuan program dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kepastian hukum memastikan pengelolaan sesuai regulasi dan prinsip syariah.

Integrasi kedua kerangka teori ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai manajemen program kemaslahatan BPKH yang mencakup tiga dimensi utama: analisis kebutuhan umat dan kapasitas kelembagaan dalam merancang program

yang efektif; implementasi dan monitoring untuk memastikan ketepatan penyaluran dana kepada sasaran yang tepat; serta dampak dan keberlanjutan program terhadap kesejahteraan umat. Analisis ini tidak hanya dilihat dari aspek teknis manajerial, tetapi juga dari aspek tata kelola yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat manajemen program kemaslahatan BPKH yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

I. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Muamalat Tower, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav. 18, Kuningan, Kuningan Tim, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 pada Staf BPKH bidang kemaslahatan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKH merupakan lembaga secara langsung yang mengelola nilai manfaat DAU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program kemaslahatan. Selain itu, di kantor pusat BPKH tersedia data dan informasi lengkap terkait program kemaslahatan serta terdapat narasumber yang kompeten untuk memberikan informasi mendalam mengenai analisis kebutuhan umat, implementasi dan monitoring, serta dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma *interpretative* dengan pendekatan kualitatif. Paradigma *interpretative* dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menginterpretasikan makna dari praktik pengelolaan dan

evaluasi program kemaslahatan BPKH berdasarkan perspektif pelaku yang terlibat langsung (Israfil & Bali, 2023).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang bagaimana proses analisis kebutuhan umat, implementasi dan monitoring program, serta dampak dan keberlanjutan program diterapkan dalam konteks nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses-proses yang terjadi secara lebih detail dan memahami dinamika yang ada dalam pengelolaan nilai manfaat DAU, serta bagaimana prinsip *good governance* diintegrasikan dalam praktik manajemen BPKH.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPKH yang terlibat dalam evaluasi program kemaslahatan, observasi terhadap dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, pedoman alokasi dana, dan hasil evaluasi program, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan nilai manfaat DAU.

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dokumen dapat saling melengkapi dan menghasilkan temuan yang kredibel (Ridlo, 2023).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mencakup data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi informasi tentang analisis kebutuhan umat, implementasi dan monitoring program kemaslahatan, serta dampak dan keberlanjutannya yang diterapkan oleh BPKH. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di BPKH, observasi langsung terhadap pelaksanaan program, serta dokumentasi berupa laporan, kebijakan, dan pedoman pengelolaan nilai manfaat DAU.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPKH yang terlibat langsung dalam proses evaluasi program kemaslahatan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pengelolaan dan alokasi dana, serta dokumentasi internal BPKH seperti pedoman kerja, dan standar operasional prosedur (SOP). Data primer ini menjadi sumber utama untuk menjawab fokus penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan keuangan BPKH yang telah dipublikasikan, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana haji (UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji), jurnal ilmiah, buku mengenai manajemen program kemaslahatan dan *good governance*, penelitian terdahulu tentang pengelolaan nilai manfaat DAU, serta publikasi resmi di website BPKH. Data sekunder ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis dan memperkuat temuan dari data primer, serta memberikan konteks teoritis dan empiris yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

5. Penentuan Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian adalah Kadiv Registrasi dan Analisis, Kadiv Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri, Kadiv Monitoring dan Evaluasi, dan tiga Staf Bidang Kemaslahatan. Sementara unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak-pihak di BPKH yang terlibat langsung dalam proses manajemen evaluasi program kemaslahatan, seperti pejabat struktural di bidang kemaslahatan, tim evaluasi dan pengawasan program, serta staf yang terlibat langsung dalam program kemaslahatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi non-partisipan terhadap proses pengelolaan program kemaslahatan, seperti mekanisme rapat evaluasi,

proses dokumentasi alokasi dana, serta aktivitas monitoring dan pelaporan di BPKH. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*)

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dilakukan dengan informan penelitian yaitu pejabat dan staf BPKH yang terlibat langsung dalam manajemen evaluasi program kemaslahatan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk mengembangkan jawaban.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan BPKH, laporan pelaksanaan program kemaslahatan, SOP pengelolaan nilai manfaat DAU, peraturan perundang-undangan terkait, hasil audit, serta dokumen pendukung lainnya.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki perspektif dan posisi berbeda dalam pengelolaan program kemaslahatan BPKH, yaitu:

- a) Kepala Divisi Registrasi dan Analisis yang menangani pemetaan kebutuhan program.

- b) Kepala Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri yang bertanggung jawab atas implementasi program.
- c) Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi yang melakukan pengawasan dan penilaian program.
- d) Staf Bidang Kemaslahatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional.

Data yang diperoleh dari masing-masing sumber akan dianalisis dan dibandingkan untuk menemukan pola kesamaan dan perbedaan. Jika data dari berbagai sumber menunjukkan konsistensi informasi, maka data tersebut dianggap kredibel. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti akan melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk mendapatkan klarifikasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab perbedaan tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang sama, yaitu:

a) Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan untuk menggali informasi, pemahaman, dan persepsi mereka analisis kebutuhan umat, implementasi dan monitoring program, serta dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan.

b) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme rapat evaluasi, proses dokumentasi alokasi dana, serta aktivitas monitoring dan pelaporan di BPKH untuk memperoleh data faktual di lapangan.

c) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti laporan keuangan tahunan BPKH, laporan pelaksanaan program kemaslahatan, SOP pengelolaan nilai manfaat DAU, peraturan perundang-undangan terkait, hasil audit, pedoman kerja, dan standar operasional prosedur untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data dari wawancara dan observasi.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas berkaitan dengan penerapan hasil penelitian pada situasi lain yang memiliki konteks serupa. Peneliti memberikan uraian rinci, jelas, dan sistematis mengenai konteks, proses, dan hasil penelitian agar pembaca dapat menilai kemungkinan transferabilitasnya.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor independen atau pembimbing. Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan secara lengkap dan sistematis.

d. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas memastikan hasil penelitian berasal dari data yang dikumpulkan di lapangan, bukan dari pemikiran subjektif peneliti. Peneliti menyimpan seluruh data mentah seperti rekaman wawancara, transkrip, catatan lapangan, dan dokumen pendukung sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok terkait analisis kebutuhan umat, implementasi, monitoring, serta dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan, serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan hubungan antar kategori data untuk memudahkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui pengumpulan data tambahan, triangulasi sumber, dan member check hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang kredibel untuk menjawab rumusan masalah penelitian.